

**PUBLIKASI ILMIAH**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA  
POLRI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

**Oleh :**

**PRAYITNO, SH.**

**A.2021141067**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the implementation of policies assistant task TNI to the Police in the province of West Kalimantan in the era of regional autonomy. The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis research we concluded that that implementation tasks perbantuan TNI run by Kodam XII / Tanjungpura to West Kalimantan Regional Police in West Kalimantan Province on the regional autonomy era faced a number of problems and obstacles that caused its implementation does not take place in accordance with the original purpose of this policy is set by the government. Security services conducted by Police in West Kalimantan has been able to keep the security situation in West Kalimantan, but the presence of some security disturbance cases show the importance of demand perbantuan military command XII / Tanjungpura but not performed optimally, causing various forms of threats not handled properly and prone to causing a threat, not only the region but the West Kalimantan Indonesia's national security as a whole. Factors that lead to ineffective implementation of tasks perbantuan by Kodam XII / Tanjungpura caused by many factors, but the most notable is the Associated public policy in the form of legislation is not clear and not synergistic in the settings assistant task, separation of the TNI and the Police in absolute terms post reform is more emotional and not equipped with the regulations can be implemented, lack of clarity on the status of the organization the military and police in the state system led to cooperation, coordination and communication between these two institutions are not going well, including in the discharge perbantuan, barriers because of the lack new regulations that bridges the role of the military and police in the field, especially to synergize the role of TNI military Command XII / Tanjungpura on MOOTW in order to provide assistance to the police and local government in the field, Ego sectoral since the separation of the TNI and the Police in 2002 was very influential and a bottleneck in implementation of security duty in West Kalimantan and West Kalimantan Governor not play an optimal role in issuing political decisions at provincial level to maintain the security in order to provide protection to the people by empowering the device in Kalbar including military and police elements.

**Keywords: Policy Implementation, assistant task, TNI to the Police.**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas implementasi kebijakan tugas perbantuan TNI kepada Polri di wilayah provinsi kalimantan barat dalam era otonomi daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Implementasi tugas perbantuan TNI yang dijalankan oleh Kodam XII/Tanjungpura kepada Polda Kalimantan Barat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada era otonomi daerah menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan yang menyebabkan implementasinya tidak berlangsung sesuai dengan tujuan awal kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah. Pelayanan keamanan yang dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Barat selama ini mampu menjaga situasi keamanan di wilayah Kalimantan Barat, akan tetapi adanya beberapa kasus gangguan keamanan yang menunjukkan pentingnya permintaan perbantuan kepada Kodam XII/Tanjungpura namun tidak dilakukan secara maksimal, menyebabkan berbagai bentuk ancaman tidak tertangani secara tepat dan rawan menyebabkan timbulnya ancaman, tidak hanya wilayah Kalimantan Barat tetapi keamanan

nasional Indonesia secara keseluruhan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan implementasi tugas perbantuan oleh Kodam XII/Tanjungpura disebabkan oleh banyak faktor, namun yang paling menonjol adalah Berkaitan kebijakan umum dalam bentuk undang-undang yang tidak jelas dan tidak sinergis dalam pengaturan tugas perbantuan, Pemisahan TNI dengan Polri secara absolut pasca reformasi lebih bersifat emosional dan tanpa dilengkapi dengan regulasi-regulasi yang dapat diimplementasikan, Ketidakjelasan tentang kedudukan organisasi TNI dan Polri dalam sistem kenegaraan menyebabkan kerja sama, koordinasi dan komunikasi kedua institusi ini tidak berlangsung dengan baik, termasuk dalam pelaksanaan tugas perbantuan, Hambatan karena belum adanya regulasi-regulasi baru yang menjembatani peran TNI dan Polri di lapangan khususnya untuk mensinergiskan peran TNI Kodam XII/Tanjungpura pada OMSP dalam rangka memberikan bantuan kepada Polri dan Pemda di lapangan, Ego sektoral sejak pemisahan TNI dengan Polri pada tahun 2002 sangat berpengaruh dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah Kalbar dan Gubernur Kalimantan Barat belum berperan secara optimal dalam hal mengeluarkan keputusan politik pada tataran provinsial untuk menjaga keamanan guna memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dengan memberdayakan para perangkat di Kalbar diantaranya unsur TNI maupun Polri.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tugas Perbantuan, TNI kepada Polri.**

## **Latar Belakang**

Peran sosial dan politik berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1988 tentang Prajurit TNI begitu dominan dalam pemerintahan pusat dan daerah, termasuk di dalam lembaga legislatif DPR dan DPRD dengan keberadaan fraksi ABRI dari kalangan TNI aktif. Dengan reformasi nasional di bidang keamanan diharapkan akan mengarahkan masing-masing institusi atau aktor keamanan pada fungsi masing-masing.

Dalam reformasi di sektor pertahanan dan keamanan salah satunya adalah pemisahan struktur TNI-Polri. Dua institusi keamanan yang sebelumnya berada dalam satu wadah organisasi, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sejak 1 April 1999 dipisahkan oleh Presiden B.J Habibie yang kemudian diperkuat berdasarkan Keputusan Presiden No. 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juli 2000. Sejak itu, Polri tidak lagi berada dalam ABRI dan berada dibawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) tetapi berada langsung di bawah Presiden RI. Dengan berpisahnya Polri, Dephankam diubah menjadi Departemen Pertahanan, dan setelah disahkannya UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menjadi Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Pemisahan tersebut kemudian dikuatkan dengan lahirnya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri. Dalam TAP tersebut secara jelas disebutkan bahwa TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pemisahan tugas dan fungsi TNI dan Polri, maka sebagian tugas yang selama ini diemban oleh TNI diserahkan kepada Polri, khususnya yang berkaitan dengan keamanan masyarakat.

Sejalan dengan reformasi di bidang pertahanan dan keamanan tersebut, sistem pemerintahan nasional juga mengalami perubahan signifikan, dengan diterapkannya otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah ini didorong oleh fakta bahwa sistem pemerintahan yang sentralistik dan monopolistik yang diterapkan sebelum era reformasi cenderung menyebabkan terbangunnya kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah pusat pemerintahan dengan daerah. Pada Undang Undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab III tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan pasal 10, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Perubahan pada sistem pemerintahan nasional, secara langsung mempengaruhi dinamika pada sektor pertahanan dan keamanan, terutama karena perubahan tersebut berlangsung secara cepat dan tidak didasarkan pada satu *grand strategy* transformasi sistem nasional. Salah satu perkembangan yang memperlihatkan pengaruh tersebut terlihat dari pemisahan tugas dan fungsi TNI dan Polri di satu sisi, tetapi juga tetap membuka keterlibatan TNI dalam domain yang diberikan kepada Polri yaitu menyangkut keamanan masyarakat. Walaupun TNI dan Polri kini memiliki perbedaan dalam lingkup tugasnya, namun dalam keadaan tertentu kedua institusi tersebut bekerjasama, yakni dalam hal tugas perbantuan kepada Polri. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa tugas pokok yang diemban TNI ada dua yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), seperti penanggulangan terorisme, separatisme, bantuan kepada kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat hingga penanggulangan bencana alam.

Menyangkut kerja sama antara kedua institusi tersebut, khususnya dalam hal tugas perbantuan kepada Polri dinyatakan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ayat (1) bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Polri memberikan bantuan kepada TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Walaupun antara TNI dan Polri memiliki hubungan vertikal dalam konteks pelibatan, tetapi untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Realitas yang ada menunjukkan bahwa permintaan bantuan Polri kepada satuan TNI sangat jarang terjadi, bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada. Dalam penanganan berbagai kasus menunjukkan kecenderungan bahwa Polri kurang melibatkan TNI. Kalaupun ada permintaan bantuan, Polri lebih cenderung meminta satuan Polri di wilayah lainnya atau bahkan dari pusat. Perkembangan ini cukup ironis, mengingat satuan-satuan TNI yang ada di komando kewilayahan yang memiliki struktur organisasi yang lengkap dan luas, didukung dengan kapabilitas SDM dan infrastruktur yang memadai dalam melaksanakan tugas perbantuan.

Banyak faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan pelibatan TNI dalam tugas perbantuan ke Polri. Salah satunya kebijakan atau peraturan yang

mengatur tugas perbantuan tersebut hingga sekarang belum ada, sehingga menyulitkan untuk mengimplementasikan dalam pola kerjanya. Padahal kebijakan ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelibatan dilakukan, dan sejauh mana batasan-batasan pelibatan dilakukan, serta dalam konteks kondisi bagaimana Polri harus meminta bantuan kepada TNI. Ketiadaan aturan yang jelas, tentunya membuat kegamangan satuan bawah, khususnya yang ada di daerah, khususnya komandokomando kewilayahan TNI AD dalam mengimplementasikan permintaan bantuan. Terlebih mengingat masih kuatnya ego sektoral diantara instansi terkait, sehingga sangat kuat terkesan enggan untuk meminta bantuan pada satuan lain.

Sebagai satu dari tiga matra TNI, berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 Pasal 8, salah satu tugas TNI AD adalah melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan. Salah satu tugas yang lain adalah memberdayakan wilayah pertahanan di darat. Ini berarti bahwa dalam rangka tugas OMP dan OMSP di darat, termasuk dalam hal ini menjaga keamanan masyarakat dalam kerangka keselamatan seluruh warga negara, juga merupakan tugas dan tanggung jawab TNI AD. Dimana dalam hal ini, untuk penggelaran kekuatan TNI AD dilaksanakan dengan dua cara, yaitu bersifat modil dan statis.

Sebagai salah satu komando kewilayahan TNI AD, Kodam Jaya merupakan satu dari 12 Kodam yang ada di jajaran TNI AD. Tanpa mengecilkan arti pentingnya semua Kodam yang ada, dimana setiap Kodam memiliki karakteristik ancaman tersendiri, maka dalam sudut pandang stabilitas nasional, peranan Kodam Jaya dapat dikatakan cukup menonjol dan memiliki nilai strategis karena bersentuhan langsung dengan eksistensi jalannya roda pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia, yaitu Kota Jakarta dan wilayah-wilayah penyangga sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau yang juga dikenal dengan Jabotabek. Dinamika politik dan keamanan yang cukup tinggi dan kompleks di Jakarta dan sekitarnya tersebut menuntut kesiapsiagaan Kodam Jaya jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu tugas perbantuan kepada Polri dalam rangka menjamin stabilitas keamanan wilayah.

Namun dalam tataran implementasinya, kebijakan perbantuan TNI kepada Polri memang mengalami sedikit masalah. Agar koordinasi dalam implementasi kebijakan berjalan dengan baik, maka menurut Nurcholis<sup>1</sup> diperlukan: 1) Adanya kesesuaian antara kebijakan dasar dan keputusan pelaksanaannya; 2) Adanya perlakuan yang sama terhadap semua aktor yang terlibat; 3) Adanya perilaku yang konsisten antara pejabat dalam menyelenggarakan

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).

tugasnya sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing; 4) Adanya tindakan para pejabat yang taat asas terhadap prosedur dan batas waktu yang telah ditentukan; 5) Adanya kejelasan kebijakan itu sendiri dan cara melaksanakannya.

Salah satu contoh dalam pilkada pada tanggal 19 september 2013 lalu Polda Kalimantan menyatakan pihaknya meminta bantuan personel TNI kepada Komando Daerah Militer XII Tanjungpura mengamankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di empat daerah . Permohonan tambahan dan bantuan personel TNI kepada Komando Daerah Militer XII Tanjungpura sebagai antisipasi adanya kerusahan massa. Begitu juga pada pemilu legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang lalu Polda Kalimantan Barat juga meminta kepada Pangdam XII Tanjungpura untuk bersama-sama mengamankan penyelenggaraan pilkada tersebut.

Tidak dipungkiri, dalam praktiknya pelaksanaan Pilkada tersebut selalu menimbulkan gejolak, terbukti tidak ada satupun penyelenggaraan Pilkada yang berjalan *zonder* konflik, yang umumnya berakar dari ketidakpuasan terhadap hasil akhir Pilkada, sebagaimana diketahui dalam *conflict fuctionalism* terdapat konsep *deprivation* dan *sense of injustice*. Pada konsep ini, perasaan diperlakukan secara tidak adil merupakan penyebab timbulnya konflik. Di luar kemungkinan adanya upaya mobilisasi massa dari pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.

Munculnya beragam konflik yang menyertai pelaksanaan Pilkada sejatinya ingin menggambarkan bahwa pelaksanaan Pilkada tidak lagi sekedar pertarungan untuk memperebutkan kursi nomor satu di daerah yang diharapkan mampu membawa daerah pada kehidupan yang lebih baik, tetapi lebih dari itu adanya sebuah pertarungan antar berbagai kekuatan dengan modal sumber daya yang tidak terbatas, apalagi dengan dibalut oleh satu tujuan “*yang penting calonku menang*”. Padahal, proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pada dasarnya bukan sekedar memilih siapa yang akan menjadi pimpinan daerahnya melainkan, lebih dari itu, suatu proses pembelajaran kehidupan berpolitik dan demokrasi yang terwadahi dalam suatu koridor hukum yang benar.

Realitas tersebut menunjukkan besarnya kerawanan potensi ancaman, baik dalam tataran nasional maupun lokal. Bila tidak diantisipasi sedini mungkin, baik melalui koordinasi kerja sama aparat keamanan dan intelijen antar instansi terkait di pusat dan di daerah maupun melalui operasi keamanan, dapat menimbulkan instabilitas nasional dan lokal. Atas dasar perkembangan tersebut, maka pemberdayaan Kowil mutlak diperlukan dalam rangka menjamin rasa aman masyarakat, yang merupakan bagian dari tugas TNI sebagai komponen

utama sistem pertahanan negara dalam hal melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

## **Permasalahan**

Faktor pendukung dan penghambat apa implementasi kebijakan Perbantuan TNI kepada Polri di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ?

## **Pembahasan**

### **1) Faktor Penghambat**

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan dan wawancara yang dilakukan, faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan tugas perbantuan TNI oleh Kodam XII/Tanjungpura adalah struktur birokrasi. Sebagai pelaksana kebijakan, struktur birokrasi menentukan keberhasilan atau efektivitas implementasi kebijakan pemberian bantuan TNI kepada Polri. Struktur birokrasi antara TNI dan Polri saat ini belum cukup mendukung bagi implementasi kebijakan pemberian bantuan, namun yang menjadi permasalahan utama adalah kedudukan antara TNI dan Polri dalam struktur kelembagaan negara berpengaruh terhadap dimensi komunikasi, sumber daya dan disposisi pelaksana.<sup>2</sup>

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan TNI kepada Polri, yang melibatkan dua institusi yang berbeda dan memiliki hubungan koordinasi yang kompleks karena kedudukannya yang berbeda dalam birokrasi pemerintahan, dibutuhkan penyesuaian terhadap masalah struktur birokrasi ini. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, struktur birokrasi dalam bidang keamanan lebih kompleks, karena terdapat pemerintahan daerah yang juga dapat meminta bantuan kepada TNI, sementara mekanisme permintaan bantuan dan pelibatan TNI belum ada. Akibatnya, ketidakjelasan semakin menguat akibat adanya otoritas di tangan pemerintah daerah di bidang keamanan, meski bukan bidang pertahanan.

Dalam pelaksanaan tugas perbantuan Kodam XII/Tanjungpura kepada Polda Kalimantan Barat, kerap kali didasarkan atas permintaan komandan satuan setempat, tidak melibatkan institusi. Permintaan yang kerap kali terjadi adalah dari Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) atau Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) kepada Komandan Resort Militer (Danrem) dan Komanda Distrik Militer (Dandim), sehingga permintaan lebih didasarkan pada hubungan personal yang tidak mengikat. Akibatnya,

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara anggota Intelkam Polda Kalimantan Barat

tugas perbantuan tidak menjadi efektif, dan yang lebih parah adalah tidak berguna ketika terjadi eskalasi.

Permasalahan pada level perumusan atau penetapan kebijakan tugas perbantuan TNI dan hambatan yang mengemuka dari masalah struktur organisasi TNI dan Polri ini, berdampak secara langsung terhadap berjalannya proses komunikasi antara kedua institusi tersebut. Ketidakjelasan kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan menyebabkan Kodam XII/Tanjungpura maupun Polda Kalbar sebagai mitranya memiliki persepsi masing-masing tentang bagaimana cara melaksanakan tugas dalam menjaga situasi keamanan di Provinsi Kalimantan Barat.

Secara legal dan empiris, sebenarnya Kodam XII/Tanjungpura sudah dilibatkan dalam pelaksanaan tugas perbantuan, dan sebaliknya, Polda Kalbar telah melakukan permintaan tugas perbantuan, namun mekanisme pelibatan dan permintaan yang tidak jelas akibat struktur organisasi yang berlapis dan berjenjang, berdampak terhadap proses komunikasi antara kedua institusi ini. Pada akhirnya, implementasi kebijakan tugas perbantuan ini tidak berlangsung sebagaimana sasaran dan tujuan dari penetapan awalnya.

Banyak kasus gangguan keamanan yang bereskalasi menjadi lebih buruk dan memakan korban jiwa karena tidak adanya permintaan bantuan. Bila ada permintaanpun, akibat kebijakan teknis berbeda, menyebabkan permasalahan di lapangan, seperti dalam kasus kerusuhan etnis di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Maluku, dan Lain-lain Padahal Polda Kalbar menghadapi keterbatasan dari sisi jumlah personel, kemampuan, hingga dukungan peralatan. Dari jumlah personel Polda Provinsi Kalbar terlihat jelas bahwa Polda Provinsi Kalbar menghadapi keterbatasan yang cukup signifikan. Dibandingkan dengan jumlah warga provinsi Kalimantan Barat, maka satu personel Polda Kalbar harus melayani setidaknya 770 warga. Sementara perbandingan ideal jumlah personel polisi dengan warga adalah 1 : 300. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan personel tersebut akan sangat rawan menyebabkan gangguan keamanan di provinsi Kalbar tidak mampu tertangani secara keseluruhan.

Dalam konteks kerusuhan etnis atau komunal, bila Polda tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya, maka sudah seyogyanya meminta bantuan kepada Kodam. Akan tetapi, seringkali permintaan ini tidak dilakukan, karena sekali lagi untuk mencegah terbentuknya opini bahwa Polri tidak mampu menguasai keadaan keamanan yang menjadi tanggung jawab utamanya.



Dalam kasus ada permintaan dari Polda, karena kebijakan teknisnya berbeda, maka mengakibatkan permasalahan di lapangan yang sangat fatal, seperti jumlah korban yang besar akibat kerusuhan etnis, kelambanan pemberian bantuan dalam kasus bencana alam termasuk banjir, penanganan demonstrasi, dan lainnya. Keberadaan kepala daerah yang juga dapat melakukan permintaan bantuan kepada TNI, juga tidak efektif, karena permasalahan terjadi di dalam pelaksanaan atau dilapangan, yang berada jauh dari lingkup kewenangan kepala daerah.

Sejumlah permasalahan yang mengemuka karena perbedaan kebijakan teknis, meskipun ada permintaan bantuan oleh Polda Kalbar kepada Kodam XII/ Tanjungpura diantaranya adalah:

- 1) Masalah komando dan pengendalian. Setelah pasukan Kodam XII/ Tanjungpura sampai di lapangan, mengemuka pertanyaan tentang siapa yang memimpin, mengendalikan dan memberikan perintah tugas. Dalam pelaksanaan operasi (militer) komando dan kendali sangat jelas yaitu komandan operasi yang ditunjuk oleh TNI. Akan tetapi dalam pemberian bantuan, yaitu pada masa damai karena hanya berupa gangguan keamanan, tidak ada kejelasan tentang hal ini, sehingga pasukan atau satuan yang diperbantukan bertindak ragu-ragu.
- 2) Masalah pemberian tugas. Meskipun telah dilakukan permintaan untuk perbantuan, personel Kodam XII/Tanjungpura yang sudah berada di lapangan tidak diberikan tugas apapun, walaupun sudah melalui beberapa tahap koordinasi, baik pada level atas maupun hingga level bawah. Akibatnya, Polda tetap kewalahan menangani gangguan keamanan, khususnya konflik komunal, kerusuhan, dan demonstrasi. Ketika perintah akhirnya diberikan, biasanya harus melalui rapat koordinasi antara Gubernur, Pangdam dan Kapolda, para personel Kodam XII/Tanjungpura yang diperbantukan baru memiliki tugas, akan tetapi hal ini tidak menghilangkan permasalahan ego sektoral di tingkat bawah yang kerap kali malah menimbulkan pertikaian antara personel Kodam XII/Tanjungpura dengan personal Polda Kalbar.
- 3) Masalah dukungan logistik. Dalam suatu operasi, baik perang maupun selain perang, TNI selalu didukung oleh logistik guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Tetapi khusus dalam tugas perbantuan, tidak ada kejelasan tentang hal ini bagi satuan yang diperbantukan. Semestinya, ketika ada pengerahan

satu TNI, dalam hal ini Kodam XII/Tanjungpura, maka pembiayaan menjadi beban Mabes TNI. Namun, karena prosedur administrasi untuk dukungan dana harus melalui proses yang cukup panjang, biasanya dukungan ini datang sangat terlambat, sehingga Pemda kerap kali memberikan dukungan dana, yang jumlahnya tidak tentu. Masalah dari hal ini, bukanlah jumlah dana, akan tetapi pemberian bantuan oleh Pemda berarti melanggar undang-undang, sehingga saat ini relatif tidak dilakukan lagi. Namun hal ini berarti personel yang diperbantukan tidak memiliki dukungan dana, yang terus bertahan hingga saat ini.

## **2). Faktor Pendukung**

Dalam rangka mengefektifkan implementasi tugas perbantuan TNI kepada Polri dan mendukung pencapaian strategi implementasi yang diperlukan untuk mewujudkannya, terdapat sejumlah faktor pendukung.

### **1) Pemberian Remunerasi**

Sejak 1 Juli 2010, pemerintah pusat menetapkan pemberian remunerasi kepada anggota TNI, Polri, dan pegawai negeri sipil dalam kerangka reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Sebagai bentuk tunjangan kinerja, remunerasi sangat membantu para personel TNI dan Polri dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak perlu memikirkan kondisi keuangan keluarganya.

Dengan adanya remunerasi, kesejahteraan prajurit terjamin dan profesionalisme terwujud. Kedepannya, kebijakan pemberian remunerasi ini dapat menghapus kesan pemerintah dan aparatnya yang selama ini dinilai buruk, seperti:

- a) Kualitas pelayanan publik yang buruk.
- b) Perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
- c) Kualitas disiplin dan etos kerja yang rendah.
- d) Birokrasi yang tidak produktif dan tidak efisien.
- e) Akuntabilitas dan transparansi yang rendah.

### **2) Hubungan Personal Antar Komandan**

Faktor penting kedua yang mendukung implementasi kebijakan tugas perbantuan oleh Kodam XII/Tanjungpura adalah hubungan personal antara komandan TNI dan Polri di wilayah Kalimantan Barat. Hubungan yang dibentuk sejak awal penugasan para komandan di satuan-satuan masing-masing, merupakan bentuk penjalinan hubungan secara institusi dan antar individu. Secara institusi,

hubungan personal ini diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah koordinasi yang belum didukung oleh adanya SOP dalam hal tugas perbantuan TNI kepada Polri.

Dalam melaksanakan tugas perbantuan TNI, para komandan di lingkungan Kodam XII/Tanjungpura tidak menghadapi hambatan koordinasi untuk pelaksanaan operasi lilin, operasi ketupat jaya, dan operasi penanganan bencana alam. Akan tetapi, untuk penanggulangan ancaman terorisme dan konflik komunal, dan terkadang penanganan unjuk rasa, masih banyak kendala. Untuk itu, dengan adanya kedekatan hubungan personal antara para komandan TNI dan Polri di jajaran Kodam XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar, hambatan koordinasi ini sedikit teratasi dan bahkan kesalahpahaman dapat dicegah. Dari sisi TNI, hubungan personel dalam konteks mendukung implementasi kebijakan bantuan kepada Polri merupakan wujud dari kerja sama instansi fungsional dalam suatu keterpaduan usaha yang sinergis. Usaha kerja sama ini, secara faktual sangat membantu dalam menjamin rasa aman di kalangan masyarakat di wilayah Kalbar dan sekitarnya.

## **Kesimpulan**

Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan implementasi tugas perbantuan oleh Kodam XII/Tanjungpura disebabkan oleh banyak faktor, namun yang paling menonjol adalah:

- a. Berkaitan kebijakan umum dalam bentuk undang-undang yang tidak jelas dan tidak sinergis dalam pengaturan tugas perbantuan. Undang-undang yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan dan pelayanan keamanan di wilayah Kalbar memperlihatkan adanya celah abu-abu, yang secara nyata mempengaruhi implementasi di tingkat bawah. Perubahan politik yang demikian cepat pada era reformasi menyebabkan penetapan undang-undang dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, dan lebih mementingkan kepentingan jangka pendek pada waktu itu, yaitu tekanan untuk memisahkan TNI dan Polri dari ABRI, guna melucuti fungsi sosial-politik TNI ketika itu.
- b. Pemisahan TNI dengan Polri secara absolut pasca reformasi lebih bersifat emosional dan tanpa dilengkapi dengan regulasi-regulasi yang dapat diimplementasikan. Dalam hal ini, berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 peran Polri adalah di sektor keamanan sedangkan TNI berdasar UU No.3 tahun 2002 berperan sebagai fungsi pertahanan. Hal ini menjadi faktor penghambat yang utama karena memunculkan ego sektoral diantara aktor keamanan khususnya TNI dan Polri.

- c. Ketidakjelasan tentang kedudukan organisasi TNI dan Polri dalam sistem kenegaraan menyebabkan kerja sama, koordinasi dan komunikasi kedua institusi ini tidak berlangsung dengan baik, termasuk dalam pelaksanaan tugas perbantuan. Dimana TNI dibawah otoritas sipil Kementerian Pertahanan sedangkan Polri langsung di bawah Presiden. Akibatnya, pelayanan keamanan kepada masyarakat relatif dikorbankan karena memang dari sisi struktur organisasi sulit untuk berkoordinasi sehingga TNI Kodam XII/Tanjungpura mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas di lapangan.
- d. Hambatan karena belum adanya regulasi-regulasi baru yang menjembatani peran TNI dan Polri di lapangan khususnya untuk mensinergiskan peran TNI Kodam XII/Tanjungpura pada OMSP dalam rangka memberikan bantuan kepada Polri dan Pemda di lapangan. Yaitu regulasi baru yang mengatur operasional di lapangan manakala TNI ditugaskan memberikan bantuan kepada Polri maupun kepada Pemda Kalbar yang menyangkut masalah komando dan pengendaliannya. Hal ini sangat penting karena dapat mengeleminir hambatan dari adanya perbedaan doktrin dalam melaksanakan tugas TNI maupun Polri di lapangan.
- e. Ego sektoral sejak pemisahan TNI dengan Polri pada tahun 2002 sangat berpengaruh dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah Kalbar. Ketidakmauan Polri meminta bantuan kepada TNI dalam hal pengamanan wilayah lebih disebabkan oleh ego sektoral yang sangat kuat.
- f. Gubernur Kalimantan Barat belum berperan secara optimal dalam hal mengeluarkan keputusan politik pada tataran provinsi untuk menjaga keamanan guna memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dengan memberdayakan para perangkat di Kalbar diantaranya unsur TNI maupun Polri. Memang forum komunikasi pimpinan daerah sudah berjalan tetapi belum sekalipun permintaan bantuan TNI kepada Polri berasal dari kekuatan eksekutif dalam hal ini Gubernur sebagai penanggung jawab pemerintahan di tingkat provinsi Kalbar. Mekanisme kerja sama TNI dengan Polri yang sudah berjalan adalah, hasil koordinasi karena kesadaran antara Pangdam dengan Kapolda karena perlunya perkuatan dari TNI kepada Polri.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Cetakan ketiga Januari. Jakarta: Suara Bebas.
- Ardhanariswari, Dwi dan Yandry K Kasim (ed.). 2008. *Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Aktor, Regulasi dan Mekanisme Koordinasi*. Cetakan Pertama Juni. Jakarta: Pacifis.
- A. Hamid S. Attamimi, 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- A. Hamid Atamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Universitas Indonesia, 1990.
- Amrah Muslimin, 1978. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978*, Alumni, Bandung.
- Andrew, William G. 1968. *Constitutions and Constitutionalism*, New Jersey: Van Nostrand Company.
- Ateng Syafrudin, 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung::BinaCipta.
- \_\_\_\_\_, 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Bagir Manan, 1990. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, 1990, UNPAD, Bandung.
- Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan Keduapuluhdua. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Friedrich, C.J. 1963. *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill.
- H.H. Gerth and C. Wright Mills, trans. eds and introduction. 1958. *From Max Weber : Essays in Sociology*. New York : Oxford University Press.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik: Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Cetakan pertama. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Winarno, Budi, Prof, Drs., MA, Phd. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Edisi revisi terbaru. Yogyakarta: CAPS.

## **A. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional  
Peraturan Pemerintah  
Nomor 26 Tahun 1981 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana  
Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan  
(Persero).